

Bulan:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tahun:

2 0 2 3



Subbagian Humas dan TU Kalan

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

tanggal:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Media:	Radar Sampit ✓	Halaman: 14
Kompas	Kalteng Pos	Borneo News
Palangka Post	Tabengan	

## Terus Perbaiki

# Pengelolaan Keuangan Daerah

**PALANGKA RAYA** - Wali Kota Palangka Raya diwakili Sekda Kota Palangka Raya Hera Nugrahayu menghadiri Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022/2023, Jumat (3/2), di gedung DPRD setempat.

Rapat Paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Palangka Raya Wahid Yusuf. Turut hadir unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kota Palangka Raya, pada asisten, staf ahli, Anggota DPRD Kota Palangka Raya, serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran Pemerintah Kota Palangka Raya.

Agenda rapat penyampaian susunan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Palangka Raya terkait pembahasan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalteng atas belanja modal infrastruktur gedung dan bangunan serta

jalan, jaringan dan irigasi tahun anggaran 2022 pada Pemerintah Kota Palangka Raya.

Sekda Kota Hera Nugrahayu mengatakan, pemkot komitmen dalam tindak pemeriksaan tersebut, dengan tujuan untuk memberikan simpulan dengan eksaminasi, review, atau prosedur yang disepakati.

"Sebab pemeriksaan kepatuhan ini diarahkan pada pelaksanaan belanja modal termasuk pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari belanja modal yang terkait infrastruktur. Tentunya hal itu sinergi dengan visi dan misi wali kota saat ini," ujarnya.

Ditegaskan Hera, langkah tersebut juga sebagai bentuk melaksanakan Pasal 20 Undang-undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

"Kami komitmen seusai pelaksanaan undang undang. Bahkan Wali Kota

menyampaikan ucapan terima kasih kepada BPK yang telah melakukan pemeriksaan kepatuhan pada saat sehingga Pemkot dapat terus melakukan perbaikan atas pengelolaan keuangan daerah. Pemkot akan menindaklanjuti hasil pemeriksaan sesuai rekomendasi yang telah diberikan BPK," paparnya.

Hera menambahkan, perbaikan sistem pengendalian internal bagi suatu pemerintahan, diperlukan dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Salah satunya bagi pelaksanaan belanja daerah.

"Pemkot terus bergerak untuk introspeksi dan perbaikan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan belanja daerah. Kami yakin hal itu berdampak positif terhadap perbaikan sistem pengendalian internal pemerintah kota," pungkasnya. (daq/gus)